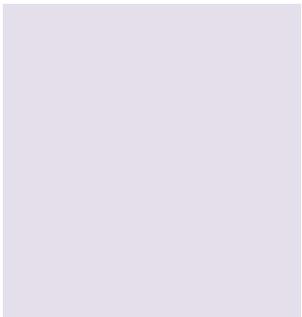
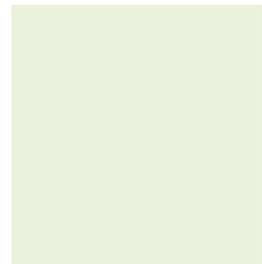
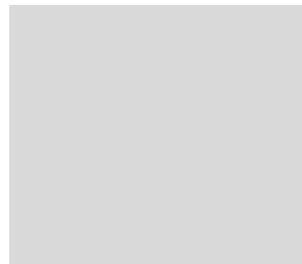


**BAB
IV**

**PERMASALAHAN
DAN ISU-ISU
STRATEGIS
DAERAH**



2017 - 2022



**RPJMD
KABUPATEN
PATI**

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis isu-isu strategis Kabupaten Pati untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun 2017-2022 mengikuti alur sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017¹. Penentuan permasalahan pembangunan sebagai bahan proses identifikasi isu strategis dimulai dari: (i) identifikasi prioritas sasaran pembangunan di RPJPD Kabupaten Pati; (ii) Evaluasi RPJMD 2012-2016; (iii) sinergitas RTRW; (iv) pengelompokan permasalahan menurut urusan pemerintahan; dan (v) analisis lingkungan strategis regional, nasional, dan internasional. Dari proses identifikasi tersebut kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Selanjutnya, dilakukan pembobotan melalui konsultasi publik, sehingga dihasilkan daftar isu strategis daerah.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang belum diatasi. Permasalahan pembangunan daerah yang akan ditangani melalui program dan kegiatan selama lima tahun mendatang dikelompokkan berdasarkan urusan, yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan

Dasar

a. Pendidikan

- 1) APK PAUD baru 45,3%, jauh di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 77,23% dan target nasional sebesar 72%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya persentase usia 5-6 tahun yang sudah masuk Sekolah Dasar (SD).
- 2) Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pati masih rendah (6,83 tahun), hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk diatas 25 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan 9 tahun masih tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan adanya upaya untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah.
- 3) Angka melanjutkan ke jenjang SMA sederajat lebih rendah dibanding angka melanjutkan ke SMP sederajat. Namun jika dilihat angka harapan lama sekolah Kabupaten Pati tahun 2016 sebesar 12 tahun (dapat dimaknai harapan lama sekolah sudah mencapai pendidikan menengah). Hal tersebut mengindikasikan adanya ketidakmerataan fasilitas pendidikan khususnya pendidikan menengah. Selain ketersediaan fasilitas, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap rendahnya angka melanjutkan ke SMA sederajat adanya kecenderungan anak tidak mau sekolah karena lebih suka bekerja mendapatkan uang. Disamping itu juga ada penyebab karena kemampuan ekonomi orang tua rendah sehingga anak-anak tersedot untuk membantu pekerjaan orang tua. Penyebab lainnya adalah pernikahan dini pada anak perempuan. Hal ini selaras dengan data Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun masih tinggi.

¹ Permendagri Nomor 86 Tahun 2017¹ tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

b. Kesehatan

- 1) Angka Kematian Bayi dan angka kematian balita justru naik di tahun 2016 hal ini diduga disebabkan oleh meningkatnya persentase kehamilan dan *neonatus* Risiko Tinggi (Risti). Selain itu cakupan kunjungan ibu hamil (K4) juga menurun. Oleh karena itu diperlukan upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kehamilan ibu dan bayi.
- 2) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat, yang dapat berakibat pada penurunan kualitas kesehatan. Selain itu juga akan berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan, diantaranya masih ada perilaku buang air besar sembarangan di badan air yang akan memberikan cemaran air cukup tinggi.
- 3) Proporsi kasus TB BTA yang berhasil diobati dalam program DOT masih rendah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kepatuhan minum obat para penderita TB yang masih rendah.
- 4) Peningkatan jumlah kasus HIV yang disebabkan tingkat pendidikan yang rendah, riwayat Penyakit Menular Seksual (PMS), jenis pekerjaan, serta kebiasaan mengkonsumsi minuman keras.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Belum terpenuhinya komponen *universal access* (100-0-100), yaitu air bersih dan sanitasi belum mencapai 100%.
- 2) Infrastruktur wilayah seperti jalan, drainase, turap kondisi baik masih tercatat di bawah 80%. Secara spesifik Infrastruktur pendukung pertanian perlu ditingkatkan mengingat Kabupaten Pati mengandalkan sektor pertanian.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Kawasan kumuh masih ada yang belum tertangani.
- 2) Kebutuhan Rumah tak layak huni yang belum tercukupi masih tinggi (kekurangan yang harus dipenuhi lebih dari 60%)

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- 1) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) di Kabupaten menurun. Jumlah pelanggaran K3 meningkat biasanya terjadi di tahun pelaksanaan Pemilu. Selain itu, permasalahan ketenteraman dan ketertiban lainnya adalah masih ditemukan kasus kriminalitas. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan budi pekerti masyarakat.
- 2) Kerugian akibat bencana masih tinggi, hal ini diduga disebabkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana masih rendah.

f. Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial masih tinggi, dikarenakan data pilah mengenai PMKS di Kabupaten Pati belum tersedia sehingga penanganan PMKS belum efektif.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

- 1) Masih terdapat pengangguran. Permasalahan ini bermakna bahwa Kabupaten Pati perlu meningkatkan perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga

kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

- 2) TPAK menurun, padahal jumlah penduduk usia kerja meningkat. Hal tersebut disebabkan penduduk usia kerja (perempuan) banyak yang menjadi ibu rumah tangga. Oleh karena itu diperlukan strategi peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, misalnya melalui usaha mikro.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kesenjangan Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMP.

Dikaitkan dengan data angka melahirkan remaja yang tinggi, diduga kesenjangan APM ini karena perempuan lebih banyak yang tidak melanjutkan sekolah karena pernikahan dini. Pernikahan dini perempuan diduga berkontribusi pada menurunnya angka partisipasi kerja perempuan. Upaya peningkatan pemberdayaan di seluruh dimensi pembangunan harus dimulai melalui keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan dan keterlibatan lembaga perempuan dalam pembangunan.

c. Pangan

Penanganan daerah rawan pangan masih rendah. Hal ini diduga karena tingkat kemiskinan di Kabupaten Pati masih tinggi. Oleh karena itu, strategi penanganan daerah rawan pangan hendaknya bersinergi dengan strategi penurunan kemiskinan. Selain itu, strategi yang bisa dilaksanakan adalah peningkatan keanekaragaman pangan.

d. Pertanian

Persentase lahan bersertifikat masih rendah (27,5%). Hal ini mengindikasikan permasalahan tata kelola pemerintahan yang perlu ditingkatkan tertib administrasinya.

e. Lingkungan Hidup

- 1) Pemantauan status mutu air di bawah 50%. Hal ini menyebabkan indeks kualitas air masih rendah (46,67). Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan limbah domestik dan industri sebagai bahan pencemar air.
- 2) Persentase penanganan sampah masih rendah (12,20%). Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan masyarakat untuk mengurangi volume sampah. Oleh karena itu perlu upaya untuk menangani sampah mulai dari sumbernya.
- 3) Rasio ruang terbuka hijau masih di bawah standar (20%). Oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk menambah ketersediaan ruang terbuka hijau di masyarakat.

f. Kependudukan dan Catatan Sipil

Kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil masih di bawah 100%. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil serta belum optimalnya kualitas layanan.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Nilai IDM Kabupaten Pati masih rendah, khususnya di indeks ketahanan ekonomi.
- 2) Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal di atas 50%.
- 3) Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat rendah, dibawah 5%. Hal ini mengindikasikan lunturnya nilai-nilai

kegotongroyongan, sehingga potensial menimbulkan permasalahan lebih lanjut dalam menghadapi tuntutan desa mandiri.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase *unmet need* di Kabupaten Pati lebih tinggi dari target nasional (menunjukkan kinerja belum optimal). Hal ini diduga disebabkan persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif masih fluktuatif. Walaupun menunjukkan kinerja cukup baik di tahun 2016.

Permasalahan lainnya adalah Angka Kelahiran Remaja per 1000 perempuan usia 15-19 tahun masih tinggi (30 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun), meskipun sudah terjadi penurunan. Data ini menunjukkan masih tingginya perempuan menikah di usia muda. Hal ini selaras dengan data bahwa masih ada kesenjangan gender di bidang pendidikan sehingga banyak perempuan tidak melanjutkan sekolah kemudian menikah di usia muda. Oleh karena itu, strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut berkaitan dengan upaya peningkatan kesetaraan gender.

i. Komunikasi dan Informatika

- 1) Jumlah PD yang Sudah Menerapkan *e-Government*/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi masih rendah, 2 OPD di tahun 2016.
- 2) Persentase PD Telah Memiliki Website (60% di tahun 2016).
- 3) Jumlah *Wi-Fi* Publik yang disediakan pemerintah (3 buah di tahun 2016).

Permasalahannya adalah masih belum optimalnya fasilitasi terhadap OPD serta kurangnya sarana prasarana dan tenaga ahli yang mengoperasikan sistem *e-Government*. Kondisi ini penting untuk diprioritaskan menuju *Smart City* yang menjadi prioritas nasional.

j. Koperasi dan UKM

- 1) Koperasi sehat masih rendah (tahun 2016 baru 2,67%). Hal ini diduga disebabkan oleh menurunnya jumlah koperasi yang berkinerja baik.
- 2) Ketersediaan data yang akurat menjadi permasalahan utama dalam pengembangan usaha mikro. Hal tersebut menyebabkan efektivitas pembinaan usaha mikro belum optimal. Oleh karena itu, strategi pengembangan usaha mikro harus dimulai dengan penyediaan data dukung yang akurat.

k. Penanaman Modal Daerah

Jumlah investor berskala nasional turun dari kurun 2013-2016. Permasalahannya adalah pemrosesan izin yang belum efektif dan kesesuaian antara lahan yang diinginkan investor dengan rencana peruntukan lahan. Oleh karena itu dibutuhkan upaya meningkatkan iklim investasi melalui kemudahan perizinan dan promosi potensi daerah berbasis data yang akurat.

l. Kepemudaan dan Olahraga

Persentase wirausaha muda sangat rendah (dibawah 1%). Hal tersebut disebabkan oleh kebiasaan masyarakat lebih suka merantau mencari pekerjaan di luar daerah. Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan minat pemuda berwirausaha.

m. Statistik

Persentase keterisian data SIPD masih rendah (40%). Permasalahannya adalah kecakapan aparatur mengelola manajemen data dan informasi

rendah dan dukungan ketersediaan data statistik sektoral masih kurang. Hal dikarenakan kesadaran pentingnya data dan pemanfaatannya untuk analisis perencanaan dan pengambilan keputusan masih rendah, sehingga tidak pernah ada pelatihan khusus analisis dan manajemen data dan informasi.

n. Kebudayaan

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi tidak ada penambahan dalam 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena pembaharuan data karya budaya belum dilakukan. Permasalahan lainnya adalah kurangnya kesadaran untuk memprioritaskan pelestarian nilai budaya dan seni sebagai bagian dari pelestarian jati diri bangsa bagi generasi penerus.

o. Perpustakaan

1) Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat sangat sedikit (2 orang);
2) Persentase perpustakaan yang sudah dibina rendah (2,64%);
Permasalahannya adalah kurangnya perhatian fokus prioritas kebijakan pengembangan perpustakaan modern sebagai penggerak masyarakat pembelajar.

p. Kearsipan

1) Pertumbuhan dokumen/arsip daerah yang telah diduplikasi dalam bentuk informatika rendah (0%).
2) Ketersediaan ahli arsiparis rendah (3 orang).
3) OPD yang menggunakan pengelolaan arsip pola baru masih rendah.
Permasalahannya adalah kurangnya fokus prioritas pada pemenuhan kebutuhan keahlian arsiparis dan sarana prasarana digitalisasi arsip.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Pariwisata

Pengunjung wisata di Kabupaten Pati masih didominasi oleh wisatawan lokal. Permasalahannya adalah objek destinasi wisata potensial belum optimal serta kurang efektifnya promosi dan kerja sama antar daerah untuk pengembangan pariwisata lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mengembangkan objek destinasi wisata potensial serta promosi dan kerja sama dengan seluruh *stakeholders*.

b. Pertanian

1) Dari tahun 2015-2016 terjadi penurunan hasil produksi pertanian sehingga pendapatan petani dan pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian juga menurun.
2) Persentase kelompok tani menerapkan teknologi pertanian/perkebunan rendah.
Permasalahannya: (i) minat masyarakat menjadi petani menurun seperti halnya gejala umum nasional; (ii) peralihan fungsi lahan pertanian; (iii) kecakapan masyarakat melakukan intensifikasi pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan masih kurang.

c. Perdagangan

1) Peningkatan jumlah pasar modern berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Oleh karena itu, program peningkatan manajemen pasar tradisional perlu dilakukan untuk menarik minat masyarakat berbelanja di pasar tradisional.

- 2) Perluasan pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Pati untuk menjawab tantangan global perlu dilakukan melalui pengembangan *e-commerce*.

d. Perindustrian

Pertumbuhan industri kreatif menurun (0,65%), padahal arah perkembangan ekonomi global menuntut pengembangan ekonomi kreatif. Permasalahannya, (i) letak geografis pedesaan berbasis pertanian; namun industri berbasis bahan baku lokal belum berkembang (ii) rata-rata lama sekolah penduduk masih rendah (6,83 tahun); dan (iii) kebiasaan masyarakat lebih suka bekerja sebagai pekerja; (iv) fasilitasi program pengembangan ekonomi kreatif masih kurang intensif; sehingga industri kreatif kurang berkembang. Permasalahan ini dapat berujung pada isu daya saing daerah.

e. Kelautan dan Perikanan

- 1) Stabilitas produksi garam masih kurang. Permasalahannya adalah perubahan iklim mempengaruhi produktivitas dan program penerapan teknologi industri hasil kelautan dan perikanan belum dikembangkan secara masif. Kondisi infrastruktur khususnya saluran tambak yang mengalami pendangkalan juga mempengaruhi produksi garam. Permasalahan ini dapat berujung pada daya saing daerah dan ketahanan pangan sebagai bagian dari kesejahteraan masyarakat.
- 2) Proporsi produksi ikan budidaya sangat jauh dibawah perikanan tangkap (1:4). Hal ini berpotensi masalah karena sangat tergantung pada ekstraksi alam. Oleh karena itu, kebijakan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan perlu diterapkan sehingga bisa terjaga keberlanjutan produksi perikanan tangkap.

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Keuangan

Pendapatan menurun dan rasio defisit pendapatan meningkat. Hal ini disebabkan oleh permasalahan dari sisi eksternal dipengaruhi oleh fluktuasi kebijakan keuangan pemerintah pusat, dan dari sisi internal kontribusi pendapatan asli daerah belum optimal. Hal tersebut diantaranya dipengaruhi oleh pengelolaan asset yang belum maksimal dan jumlah objek pajak yang masih rendah. Pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuan daerah dalam meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial.

b. Urusan Perencanaan

Keterisian SIPD yang masih rendah (40%) menjadi permasalahan bagi perencanaan yang akurat dan valid. Data sebagai bahan utama pengukuran capaian kinerja, sehingga tanpa ketersediaan data pengukuran yang valid maka tidak akan dapat dihasilkan perencanaan dan evaluasi kinerja yang akuntabel. Jadi muara persoalan urusan perencanaan adalah tata kelola data dan informasi kinerja pembangunan.

Penerapan sistem aplikasi dialogis 2 arah untuk perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan belum diterapkan. Permasalahan ini akan bermuara pada kesiapan tata kelola pemerintah untuk menjalankan *smart governance* yang merupakan bagian target nasional pengembangan *Smart City*.

c. Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kebutuhan keahlian khusus sesuai tugas dan fungsi belum dimasukkan secara khusus dalam data basis kebutuhan pengembangan ASN. Sebagai contoh: keahlian perencana, keahlian manajemen data dan informasi, keahlian analisis kebijakan, keahlian analisis dampak lingkungan, keahlian komunikasi massa/hubungan masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, pembaharuan basis data pengembangan ASN diperlukan untuk peningkatan profesionalitas ASN.

d. Penelitian dan Pengembangan

Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan sebagai kebijakan daerah masih rendah. Hal ini disebabkan karena penelitian yang dilaksanakan belum didasarkan permasalahan dan isu-isu yang ada di daerah.

Sementara itu, pemanfaatan hasil pengembangan juga masih rendah. Permasalahannya dimungkinkan berasal dari kualitas inovasi yang belum standar. Kemungkinan lain disebabkan oleh proses penilaian dan pengesahan sebagai bentuk inovasi dan rekomendasi implementasi memerlukan proses yang melibatkan banyak pihak sehingga memerlukan waktu yang tidak singkat.

e. Pengawasan

Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti menurun (83%). Hal ini disebabkan karena jumlah sumber daya manusia tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja menurun (64,3%).

4.2 Isu Strategis

Isu Nasional yang merupakan ratifikasi dari isu internasional dan menjadi pengarusutamaan pembangunan adalah isu Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDG's)*. SDG's memiliki 17 tujuan, yaitu:

- a. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
- b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan;
- c. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia;
- d. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
- e. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan;
- f. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
- g. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang;
- h. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
- i. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;
- j. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara;
- k. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;
- l. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;

- m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- n. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;
- o. Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;
- p. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan;
- q. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Selain Pembangunan Berkelanjutan, lingkungan global juga memberikan tantangan revolusi industri ke empat sebagai akibat kemajuan teknologi informasi. Revolusi industri menguatkan dominasi global yang melampaui batas administrasi negara dan menyatukan pasar industri barang dan jasa. Lingkungan global ini menggiring pada tantangan isu daya saing daerah supaya tetap eksis bagi kesejahteraan masyarakat. Tantangan revolusi teknologi informasi juga menggiring ke arah isu pengembangan *smart city* sebagai antisipasi perkembangan global.

Revolusi teknologi informasi dalam konteks dinamika politik global juga berdampak pada kecepatan transformasi budaya lintas batas. Hal ini memberikan ancaman tersendiri bagi eksistensi ideologi dan budaya lokal di kalangan generasi muda. Lingkungan global ini memicu isu keamanan dan stabilitas wilayah.

Tantangan isu nasional lainnya adalah sebagaimana disebutkan sebagai sasaran pokok pembangunan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 258, yaitu: (i) peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; (ii) kesempatan kerja; (iii) lapangan berusaha; (iv) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; (v) daya saing daerah.

Tantangan isu dari RPJMD Provisi Jawa Tengah, yaitu: (i) Kemiskinan; (ii) Pengangguran; (iii) Infrastruktur; (iv) Kedaulatan Pangan; (v) Kedaulatan Energi; (vi) Tata Kelola Pemerintahan; (vii) Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah.

Tantangan isu dari kewenangan daerah Kabupaten Pati sebagai berikut:

1. Mandat RPJPD Kabupaten Pati yaitu: (i) Kualitas SDM yang berkualitas dan berbudaya; (ii) pertumbuhan ekonomi; (iii) lingkungan hidup yang berkelanjutan; (iv) tata pemerintahan yang baik; (v) prasarana dan sarana yang kondusif; (vi) daya tarik dan daya saing daerah.
2. Mandat dari RTRW kabupaten Pati yaitu: (i) melayani PKL; (ii) sebagai salah satu kawasan lindung geologi.
3. Mandat Visi misi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Pati, yaitu: (i) isu kesejahteraan masyarakat; (ii) Isu pelayanan publik.
4. Tantangan isu dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis, diidentifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas, yaitu: (i) Isu kemiskinan; (ii) Isu penurunan produktivitas tanaman pangan; (iii) Isu penambangan tanpa izin; (iv) Isu rawan bencana alam dan iklim; (v) Isu penurunan kualitas dan kuantitas air; (vi) Isu pengelolaan limbah domestik belum optimal; (vii) Isu pengelolaan limbah industri belum optimal; (viii) Isu pengelolaan

persampahan belum optimal; (ix) Isu kurang sadarnya masyarakat dalam pengelolaan hutan; (x) Isu menurunnya tutupan lahan hijau.

Setelah melakukan analisis SWOT isu, dilakukan proses pembobotan isu, dan konsultasi publik, maka ditarik kesimpulan bahwa payung besar isu strategis Kabupaten Pati meliputi:

- 1) Isu sarana prasarana wilayah dan kerja sama antar daerah;
- 2) Isu pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana;
- 3) Isu Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- 4) Isu Penguatan ekonomi dan daya saing daerah;
- 5) Isu tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi

Penjelasan masing-masing isu strategis daerah tersebut diuraikan pada bagian berikut ini.

1. Isu Sarana Prasarana Wilayah dan Kerjasama antar wilayah

Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah termasuk kawasan strategis Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), **Koridor Ekonomi Jawa** memiliki tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”. Kebijakan nasional yang menempatkan peningkatan konektivitas sebagai prioritas, memunculkan isu strategis pembangunan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang kegiatan ekonomi. Isu strategisnya adalah bagaimana mengoptimalkan sinergitas sumberdaya dan sumber dana secara akuntabel untuk mengendalikan penataan ruang sehingga kabupaten Pati memiliki luasan kawasan strategis yang bertambah produktivitas dan daya dukungnya.

Pengembangan kawasan strategis yang berdaya saing juga memerlukan konektivitas antar wilayah, termasuk konektivitas antar kecamatan cukup baik dan telah didukung dengan trayek kendaraan umum. Tantangan isu strategis lain untuk mendukung pengembangan Kabupaten Pati sebagai kawasan strategis MP3EI adalah pemenuhan kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan kuantitas dan kualitas yang cukup sesuai kebutuhan.

Kabupaten Pati sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Wanarakuti, dialokasikan 2 (dua) kawasan inti, yaitu: (i) Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Margorejo dan (ii) Pelabuhan Perikanan Juwana. Implikasinya pada perencanaan pembangunan Kabupaten pati yaitu: (i) peningkatan status jalan Jepara-Juwana menjadi jalan provinsi; (ii) melanjutkan pembangunan kolam tambat kapal; (iii) pengembangan turap dermaga; (iv) pengadaan angkutan umum Kudus- Pati.

Kabupaten Pati dalam lima tahun terakhir memiliki kecenderungan proporsi anggaran untuk pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan berkala jalan pada APBD, maupun DAK lebih besar dibanding kegiatan lainnya. Kabupaten Pati telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif. Dalam RPJMN buku III, Kabupaten Pati juga direncanakan Pembangunan Bendung Karet Tondomulyo.

Kesimpulannya isu strategis bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yaitu isu daya dukung sarana prasarana wilayah untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perincian secara

lebih detail terkait dengan isu strategis bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah diuraikan sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah: transportasi, sanitasi, jalan, jembatan, irigasi;
- 2) Infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi;
- 3) Isu penataan ruang pendukung pertumbuhan wilayah;
- 4) Isu pemenuhan *universal access 100-0-100*;
- 5) Isu sarana publik yang sehat;
- 6) Isu penyediaan perumahan;

Isu infrastruktur dan pengembangan wilayah diakomodir dalam misi Bupati terpilih melalui misi ke tujuh yaitu "Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah".

2. Isu pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana

Lingkungan hidup yang sehat menjadi isu strategis menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan dan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Berikut ini adalah isu-isu yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan terkait lingkungan hidup berkelanjutan.

Kondisi topografi dan geologi, sebagian besar wilayah Pati merupakan daerah rawan bencana sehingga bencana hampir terjadi setiap tahun. Pola hidup masyarakat yang tidak peduli terhadap pengurangan risiko bencana yang ditandai dengan besarnya kerugian akibat bencana menunjukkan bahwa kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah.

Penurunan kualitas sumberdaya air diakibatkan oleh pencemaran dan aktivitas penduduk yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Diantaranya buangan limbah industri dan domestik yang belum terolah dengan baik. Selain itu perilaku masyarakat yang masih BABS terutama di badan air, turut berkontribusi meningkatkan cemaran air.

Penurunan kuantitas sumberdaya air disebabkan karena berkurangnya kawasan tangkapan air. Hal ini terkait alih fungsi lahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Terjadinya alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun juga akan berakibat pada peningkatan emisi karbon yang akan meningkatkan kerawanan bencana iklim yang berdampak pada anomali cuaca.

Secara ringkas isu keberlanjutan lingkungan hidup terkait dengan dampak perubahan iklim yang berisiko pada kejadian bencana alam. Fokus isu lingkungan mencakup: (i) Isu kelestarian lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran; (ii) Isu peningkatan lingkungan permukiman dan sanitasi sehat.

Isu Lingkungan hidup direspon dengan misi ke delapan yaitu "Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan".

3. Isu Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial

Isu pemerintahan bidang sosial budaya diakomodir melalui misi pertama Bupati terpilih 2017-2022 "Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal"; misi ke dua "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan", dan misi ke tiga "Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan".

Kondisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pati masuk kategori sedang, yaitu rangking 20 dari 35 kab/kota dengan skor 69,03 pada tahun 2016. Fokus isu peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah pemenuhan hak ekonomi sosial budaya (termasuk pendidikan, kesehatan, pangan) sebagai pilar kesejahteraan rakyat.

Isu kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari hal penurunan pengangguran dan penanggulangan kemiskinan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu memenangkan persaingan pasar tenaga kerja. Semakin banyak yang terserap di lapangan kerja maka pertumbuhan pendapatan akan meningkatkan modal perluasan kesejahteraan.

Pemerintah daerah, sebagai representasi negara, dapat menjalin kerjasama swasta (sektor kedua) untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus memfasilitasi elemen-elemen masyarakat lokal untuk menciptakan pemerataan. Pertumbuhan dan pemerataan itu merupakan dua pendekatan untuk membangun kemakmuran.

Di sisi lain pemerintah daerah dapat melancarkan reformasi pelayanan publik. Pelayanan publik yang paling dasar adalah pendidikan dan kesehatan. Fokus isu bidang kesehatan: (i) sinergitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta; (ii) partisipasi masyarakat berperilaku hidup sehat untuk menurunkan risiko angka kesakitan dan kematian; (iii) peningkatan kepemilikan jaminan kesehatan di masyarakat.

Aspek kesejahteraan sosial juga mencakup penguatan kapasitas individu, keluarga, rumah tangga, dan kelompok masyarakat untuk mampu mandiri mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada kondisi tertentu diperlukan kebijakan jaring pengaman untuk kelompok rentan supaya tidak mengalami peminggiran dan lebih terpuruk dalam ketidaksejahteraan. Oleh karena itu isu kesejahteraan selanjutnya adalah Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan. Kelompok rentan dapat merujuk pada kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), keluarga rentan miskin, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan karena relasi gender yang belum setara dan adil.

Kesimpulan isu strategis pembangunan kualitas sumber daya manusia meliputi fokus isu sebagai berikut:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) daya saing tenaga kerja;
- 4) Kemiskinan;
- 5) Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

4. Isu Penguatan ekonomi dan daya saing daerah

Merujuk unggulan Bupati 2017-2022, penguatan ekonomi diprioritaskan bidang produksi hasil pertanian, perikanan, dan pariwisata yang berbasis budaya lokal dan penguatan pelaku UMK. Data menunjukkan bahwa NTP dan kunjungan pariwisata di Kabupaten masih rendah. Pertumbuhan nilai ekspor juga masih rendah. Secara umum daya saing Kabupaten Pati masih rendah, yaitu rangking 27 dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah menurut survei Bank Indonesia Perwakilan Kantor Jawa Tengah tahun 2016.

Kabupaten Pati dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kawasan strategis yaitu Kawasan Juwana, Jepara, Kudus, Pati (Wanarakuti) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan. Kabupaten Pati terletak di jalur perdagangan nasional.

Dalam konstelasi MP3EI Kabupaten Pati termasuk **Koridor Ekonomi Jawa** memiliki tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”.

Kebijakan nasional dalam hal peningkatan produksi tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan menjadi peluang bagi Kabupaten Pati mendapatkan fasilitasi pengembangan daerah pertanian. Fokus isu strategis yang pertama harmonisasi kebijakan pengembangan ekonomi wilayah. Kabupaten Pati memiliki potensi pengembangan pertanian, didukung lahan pertanian yang cukup luas dan memiliki sumber air pertanian yaitu dua waduk. Selain pertanian, Kabupaten Pati berada di sepanjang garis pantai, dan memiliki lahan budidaya perikanan dan lahan peternakan.

Sementara itu, salah satu aspek pendukung daya saing daerah adalah ketahanan pangan. Isu ketahanan pangan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas sumber pangan. Aspek yang dipenuhi (1) ketersediaan, kecukupan, stabilitas, aksesibilitas, kualitas, keterjangkauan serta keamanan pangan secara berkesinambungan; (2) mengamankan stok cadangan pangan dan pengendalian harga pangan di daerah. Indikasi ketahanan pangan mencakup produksi hasil tanaman padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi dan produksi perikanan.

Fokus isu strategis kedua, kerjasama antar daerah dan penguatan stakeholder (pemangku kepentingan) untuk pengembangan daya saing daerah. Beberapa diantara yaitu:

- a. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) berperan mengkoordinasikan segala jenis usaha agribisnis dalam rangka peningkatan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
- b. Kelompok Masyarakat (Pokmas) membantu pemerintah sebagai pengawas jika ada pelanggaran kerusakan lingkungan;
- c. Forum penyelamat pesisir berperan dalam pemeliharaan dan pengendalian usaha mangrove.
- d. Kelompok wanita tani berfungsi sebagai wadah pemberdayaan wanita dalam pemanfaatan lingkungan untuk penganekaragaman dan keamanan pangan;
- e. Kelompok lumbung berperan dalam pengembangan ketahanan pangan masyarakat.

Dukungan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati untuk pengembangan potensi ekonomi masyarakat sudah dilakukan, seperti program KUR bagi penguatan permodalan UMKM, revitalisasi pasar tradisional, pengembangan koperasi, pembentukan perangkat daerah yang menangani perizinan satu pintu untuk pengembangan usaha. Harmonisasi kebijakan daerah dengan pusat menjadi salah satu fokus isu pembangunan ekonomi.

Fokus ketiga adalah pengembangan nilai tambah sektor pertanian dan UMK dan perluasan jangkauan pemasaran. Kabupaten Pati masih menghadapi berbagai kelemahan untuk pengembangan daya saing ekonomi daerah. Permasalahan dari sistem produksi antara lain: (i) produktivitas belum sesuai dengan potensinya; (ii) keterkaitan antara sektor usaha mikro secara kelembagaan masih rendah; (iii) pertumbuhan wirausaha baru masih rendah; dan (iv) lembaga pendamping bisnis berbasis teknologi masih sangat sedikit. Dari sisi pemasaran, kemajuan teknologi informasi memberikan tantangan bagi kompetisi daya saing daerah menjadi lebih

nyata dan cepat. Kabupaten Pati perlu mengembangkan kesiapan ekonomi digital untuk menghadapi tantangan ekonomi pasar global.

Fokus isu keempat adalah pengembangan pariwisata. Sehubungan dengan ditetapkannya provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu kawasan destinasi nasional, kabupaten Pati termasuk dalam kawasan wisata terintegrasi PAKUDJEMBARA (Pati, Kudus, Demak, Jepara, Rembang, Blora). Sektor pariwisata menjadi unggulan Bupati 2017-2022. Kabupaten Pati juga sudah merencanakan penyusunan PERDA pengembangan pariwisata. Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga masyarakat sadar wisata (POKDARWIS), dan pusat informasi pariwisata (TIC) dan terdapatnya jalur wisata religi yang strategis di sekitar Kabupaten Pati. Sarana prasarana penunjang dan akses menuju objek wisata belum memadai dan belum optimalnya pengemasan budaya lokal yang menjadi salah satu daya tarik wisata.

Fokus kelima adalah isu konservasi dan pengembangan kekayaan sejarah, dan seni budaya daerah. Aktualisasi nilai budaya dan seni merupakan salah satu pilar penyangga daya saing daerah. Nilai budaya yang positif jika dihayati akan mampu mendorong produktivitas masyarakat. Sedangkan seni budaya dilestarikan sebagai kekayaan daerah, namun juga dapat dikembangkan dalam konteks mendorong industri kreatif masyarakat. Keduanya memberi nilai tambah bagi daya saing daerah.

Perubahan iklim meningkatkan risiko bencana alam, misalnya banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Risiko kebijakan nasional dan regional provinsi juga perlu diantisipasi dampak negatifnya bagi keberlangsungan lingkungan hidup dan lingkungan budaya supaya tidak terjadi peminggiran komunitas dan perusakan ekosistem. Hal ini berarti Kabupaten Pati juga menghadapi isu penguatan ekonomi berperspektif keberlanjutan lingkungan. Selain ancaman bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban dapat mengurangi kondusivitas wilayah dan pada gilirannya menurunkan daya saing daerah. Selain itu, kondusivitas wilayah juga dapat diukur dari kemudahan perizinan usaha.

Isu strategis bidang ekonomi diakomodir Bupati terpilih 2017-2022 melalui misi ke-lima yaitu "Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja". Selain itu juga misi ke-enam, yaitu "Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri".

Dari kondisi di atas, isu strategis yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pati di bidang pembangunan ekonomi dirumuskan dalam sub-isu berikut:

- 1) Harmonisasi kebijakan pengembangan ekonomi wilayah;
- 2) Kerjasama antar daerah, kerjasama dengan dunia usaha, dan kerjasama dengan komunitas masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pertukaran pengetahuan dan teknologi yang pro lingkungan (*green economy*);
- 3) Isu pengembangan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk daerah;
 - a) Peningkatan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan; dan pengembangan UMK yang prolingkungan (*green economy*);

- b) Pengembangan *Smart economy*/ ekonomi digital/ *e-commerce*, yaitu pemasaran potensi pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata berbasis teknologi informasi;
- 4) Ketahanan pangan;
- 5) Isu pengembangan potensi pariwisata;
- 6) Isu konservasi dan pengembangan kekayaan sejarah, dan seni budaya daerah;
- 7) Isu kondusivitas dan stabilitas daerah;
 - a) Kondusivitas pengurusan perizinan;
 - b) Derajat Keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi;
 - c) Penegakan hukum penggunaan lahan;

5. Isu Strategis Tata Kelola Pemerintah yang akuntabel dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Isu bidang pemerintahan selaras dengan misi bupati terpilih "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik". Fokus misi ini adalah membangun unsur sikap perilaku dan budaya yang melekat pada aparatur (ASN) dalam mengutamakan pelayanan publik.

Isu tata kelola pemerintahan yang pertama perluasan jenis layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi (*e-Government*). Hal ini dilatarbelakangi oleh tuntutan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (TI) diharapkan meningkatkan akuntabilitas publik berbasis data kinerja yang benar, andal dan akurat.

Isu ini tidak terlepas dari isu transparansi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan. Transparansi informasi mencakup (i) informasi penyelenggaraan layanan publik; (ii) kinerja penyelenggaraan pemerintahan; (iii) pengelolaan keuangan daerah. Serangkaian proses tersebut memerlukan data kinerja yang benar, andal dan akurat. Data berperan penting dalam proses perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengambilan keputusan. Gerakan nasional *e-Planning*, *e-Budgeting* dan *smart city* menjadi keniscayaan bagi Pemerintah Kabupaten Pati menjawab isu penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis *e-government*.

Fokus isu ketiga adalah peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan efisiensi belanja daerah untuk memaksimalkan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.

Fokus isu tata kelola keempat yaitu peningkatan kualitas profesionalitas dan akuntabilitas ASN serta kelembagaan organisasi yang efektif dan efisien. Tata kelola yang baik selaras dengan isu reformasi birokrasi dan ASN berbasis kinerja.

Selanjutnya fokus kelima adalah isu harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah yang berbasis akurasi data dan implementatif merupakan salah satu fokus isu reformasi birokrasi. Termasuk dalam bagian ini adalah pengawasan dan penegakan hukum atas implementasi regulasi daerah. Dalam kurun waktu 2017-2022 Kabupaten Pati memerlukan: (1) Kebijakan peningkatan sumber pendapatan daerah; (2) kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa); (3) partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan daya saing daerah; (4) kebijakan tentang pemanfaatan kekayaan alam yang pro keberlanjutan lingkungan; (5) Kebijakan pelaksanaan peraturan perundangan yang lebih tinggi lainnya.

Kesimpulannya, isu bidang pemerintahan adalah Isu tata kelola

pemerintahan (*governance*) yang bersih, profesional, responsif dan akuntabel, yang terdiri dari sub isu:

- 1) Perluasan jenis layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang responsif berbasis teknologi informasi (*e-Government*).
- 2) Isu transparansi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan berbasis TI dengan data yang andal dan terbaru.
- 3) Manajemen keuangan daerah dan peningkatan kapasitas fiskal;
- 4) Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN;
- 5) Harmonisasi regulasi daerah yang berbasis kajian kelitbang.